BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keselamatan dan kesehatan kerja mencakup semua upaya untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan akibat kerja. Banyak negara memiliki regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk menerapkan standar K3 demi melindungi karyawan. Mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan menilai seberapa besar risiko yang ditimbulkan terhadap pekerja merupakan hal terpenting didalam perusahaan. Dengan menerapkan lingkungan kerja yang aman serta nyaman maka dari itu dapat menciptakan suasana dimana karyawan dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa khawatir akan potensi bahaya ditempat kerja.

Di banyak negara, undang-undang mengatur tanggung jawab perusahaan dalam hal kecelakaan kerja. Oleh karena itu perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, peralatan yang layak, serta pelatihan yang memadai untuk mencegah kecelakaan dan penyakit. Dalam banyak sistem hukum, terdapat undang-undang yang secara khusus melindungi pekerja dari kondisi kerja yang berbahaya. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi tentang bahaya di tempat kerja, hak untuk menolak pekerjaan yang berisiko tinggi, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kecelakaan.²

² G. Silaban, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Medan: CV. Prima Jaya, 2019) h 42

Dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja merupakan bagian dari upaya agar memastikan pekerja dapat melakukan pekerjaan mereka dalam lingkungan yang aman dan sehat. Di banyak negara termasuk Indonesia, perlindungan ini diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.³ Hal tersebut dapat dinyatakan penerapan K3 sangat penting karena dapat meminimalisir terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, membantu perusahaan mengurangi risiko kerugian finansial, meningkatkan reputasi dan citra baik di mata masyarakat.

Tujuan dari kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk menjamin tenaga kerja dan hak-hak pekerja dimanfaatkan secara optimal dan manusiawi, memberikan perlindungan dan keselamatan terhadap tenaga kerja di tempat kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pemberi kerja diperlukan guna menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan tempat kerja. Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang lebih spesifik mengenai K3, seperti Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.⁴ Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disingkat SMK3, merupakan dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan. SMK3 dirancang untuk

³ Undang - undang ketenagakerjaan (Grahamedia Press, 2020) h 42

⁴ Peraturan pemerintah RI. No. 50 tahun 2012 tentang Sistem manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3).

mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas kerja, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dalam peraturan pemerintah No 50 tahun 2012 dijelaskan mengenai tujuan atas penerapan SMK3 yaitu, meningkatkan suatu efektifitas atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terancang, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.⁵

Dalam meminimalisir terhadap kecelakaan kerja maka dari itu pihak perusahaan wajib melakukan pelatihan terhadap cara menggunakan peralatan kerja dengan baik dan benar. Perusahaan diwajibkan menyiapkan peralatan kerja yang aman saat dipakai pada saat berkerja. Perusahaan harus memasang rambu-rambu prosedur kerja yang jelas dan terlihat jelas serta mudah dibaca oleh semua orang. Sasaran utamanya adalah melindungi pekerja dan karyawan terhadap potensi risiko. Tindakan ini termasuk memeriksa area *workshop*, proses kerja, dan sistem izin kerja, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku, kualifikasi, dan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan beserta tindakan pengendaliannya.

Menangani masalah keselamatan ditempat kerja dalam suatu organisasi harus didekati dengan serius. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan hanya tanggung jawab petugas HSE saja, melainkan harus menjadi perhatian semua orang yang ada dilingkungan tempat kerja. K3 lebih dari sekadar pemasangan spanduk, poster, dan slogan kemudian harus menjadi aspek mendasar dari pengalaman setiap

⁵ Rumondong, *Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo 2018) h 342

pekerja di tempat kerja. Kuncinya terletak pada kesadaran terhadap faktor risiko dan perilaku kebiasaan bekerja secara sehat dan aman.⁶

Pentingnya sektor konstruksi khususnya bangunan baja, memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi suatu negara. Namun, sektor ini juga dikenal dengan risiko tinggi terkait keselamatan kerja. Data menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi cukup signifikan, yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Pekerjaan di bidang konstruksi bangunan baja melibatkan berbagai risiko, seperti jatuh dari ketinggian, cedera akibat alat berat, dan paparan bahan berbahaya. Tanpa penerapan sistem K3 yang baik, pekerja berisiko mengalami kecelakaan yang dapat berakibat fatal.⁷

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang berfokus pada perlindungan dan pemajuan kepentingan manusia. Dalam konteks K3, *maqashid syariah* menekankan, Pelestarian jiwa yang artinya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja sebagai prioritas utama. Kemudian kesejahteraan sosial yang artinya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja melalui lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perusahaan dan pengusaha memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi pekerja mereka. Dalam perspektif *maqashid syariah*, melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral yang harus dipenuhi.

⁶ Buntarto, *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019) h 32

⁷ Haerani, Kusdi Raharjo, *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.15 No.1 2020) h 17

Dalam hadits Rasulullah saw menerangkan bahwa umat manusia diharuskan beretos kerja serta bekerja secara profesionalisme. Seperti hadist berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Dari Aisyah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).⁸

Sesuai pada hadits tersebut semua umat manusia diharuskan untuk bekerja secara profesional. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa semua aktivitas kerja harus dilakukan dengan tekun dan terencana secara baik. Dalam pendidikan Islam juga mengajarkan segala sesuatunya harus dilakukan dengan rapi, tertib sesuai prosedur, dan teratur. Prosedur tersebut harus diikuti dengan benar. Dengan pekerjaan yang jelas sesuai dengan prosedur serta transparan maka umat tersebut akan mendapatkan amal dari Allah SAW.⁹

Dengan melaksanakan K3 yang baik maka tidak hanya memenuhi standar regulasi, akan tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, keadilan dengan memberikan upah yang adil dan perlindungan bagi semua pekerja. Transparansi dengan membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan pekerja terkait kebijakan K3. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat penting dalam berbagai konteks, terutama di lingkungan kerja yang berisiko,

⁸ HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334

⁹ Hadis HR. Thabrani

seperti industri konstruksi baja. Penerapan kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD sangat penting sebagai tanggung jawab perusahaan untuk melindungi pekerja dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko kecelakaan di tempat kerja dan penyakit akibat kerja mengharuskan perusahaan melakukan lebih dari sekadar menyediakan APD lengkap dan mengharuskan pekerja menggunakannya sesuai prosedur operasi standar SOP. Perusahaan harus mendorong kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD.¹⁰

PT. Eka Bintang Perkasa merupakan perusahaan konstruksi baja yang berbasis di Kab. GRESIK. Tepatnya di Grand Soetomo R4-R5, Tlogopatut, Gresik *Regency*, East Java 6111, Indonesia. PT Eka Bintang Perkasa merupakan salah satu pemimpin di industri konstruksi baja dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur, *supply* barang serta proyek komersial skala besar.

Ruang lingkup pekerjaan di PT Eka Bintang Perkasa diantaranya:

1) *Offshore Project*

Tempat di laut lepas Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia. Pekerjaan yang berhubungan dengan bangunan atau struktur yang dibangun di atas laut dimulai dari pesisir sebagai penunjang kegiatan proses eksplorasi pada umumnya Minyak dan Gas (Perakitan *Cargo Basket Offshore*, Pekerjaan Katalis dan Perancah Gagak Rimang).

2) *Workshop Fabrication Steel Project*

¹⁰ Andi Achru AB. *Pasinringi, Ilmu Fiqh* (Cet. I; Sulawesi Selatan: Syahada, 2018) h 122

Tempat pabrik *workshop* PT Eka Bintang Perkasa di Desa Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Tempat tersebut sebagai proses produksi logam yang meliputi, antara lain, rekayasa, pemotongan, pembentukan, penyambungan, perakitan, atau penyelesaian.

Beberapa kecelakaan kerja yang sering terjadi di bidang konstruksi PT Eka Bintang Perkasa yaitu, mata terkena percikan gram yang di alami oleh beberapa karyawan yang salahsatunya karyawan atas nama Reza pada bulan Februari tahun 2024. Hal tersebut di sebabkan karena karyawan yang lalai atau tidak terpakainya APD pelindung mata (*spectacles atau goggles*) dengan baik dan benar. Kecelakaan kerja seperti luka bakar pada tangan juga sering terjadi pada karyawan salahsatunya yang dialami oleh karyawan atas nama Irfan pada bulan Juli Tahun 2024. Hal tersebut terjadi karena karyawan tidak memakai pelindung tangan (sarung tangan *safety*) saat bekerja. Hal tersebut sering terjadi juga dikarenakan lemahnya pengawasan dari *Healthy Safety Security* dan banyak juga disebabkan oleh kurangnya disiplin tenaga kerja/karyawan dan seharusnya karyawan menaati semua peraturan yang sudah di buat oleh PT Eka Bintang Perkasa.¹¹

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dari PT Eka Bintang Perkasa yang telah memiliki izin usaha tersebut perusahaan sudah menyediakan *safety* atau alat pelindung diri (APD) secara lengkap akan tetapi di lapangan pekerja/karyawan tidak memakai (APD) *safety* dengan baik dan benar bahkan ada beberapa pekerja/karyawan tidak memakai perlindungan tersebut saat mereka bekerja. Oleh

¹¹ Elang, hasil wawancara sebagai HSE *Officer* PT Eka Bintang Perkasa, (Gresik: 29 November 2024)

karena itu salah-satunya yang bisa menjadi faktor menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di PT Eka Bintang Perkasa.

Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya K3, tantangan seperti kurangnya pelatihan, minimnya sumber daya, dan budaya kerja yang tidak aman masih sering dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis maqashid syariah dapat menjadi solusi untuk mendorong perubahan positif dalam pelaksanaan K3. Dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dibidang konstruksi bangunan baja harus dilihat dari perspektif maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan jiwa dan kesehatan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik K3, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif, serta meningkatkan kualitas hidup pekerja secara keseluruhan.¹²

Berdasarkan melihat kondisi yang terjadi di lapangan, maka penulis berinisiatif mengangkat penelitian mengenai **“Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi di PT Eka Bintang Perkasa Gresik)”**.

¹² Bismi Nursyamsia Maryam, *Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqosyid Al syariah*, (jurnal Siyasatuna: Volume 3 Nomor, 2022) h 21

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam kecelakaan kerja di PT Eka Bintang Perkasa Gresik?
2. Bagaiman tinjauan maqashid Syariah terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Eka Bintang Perkasa Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1. Untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam kecelakaan kerja di PT Eka Bintang Perkasa Gresik.
2. Untuk menganalisis tinjauan maqashid Syariah terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Eka Bintang Perkasa Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi para pembaca atau pihak lain yang berkepentingan. Adapun kegunaan dalam penelitian adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi serta dapat menambah pengetahuan baru agar dapat dijadikan sebagai sumber referensi

bagi para peneliti selanjutnya terutama bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan dan meneliti khususnya mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja dalam perspektif maqashid syariah.

2. Praktis

- a. Manfaat bagi PT. Eka Bintang Perkasa Gresik sebagai masukan pembelajaran dan agar menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik dan benar agar mengurangi resiko kecelakaan kerja.
- b. Diharapkan dapat mempermudah mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dalam memahami konteks dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja perspektif maqashid syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan kemiripan pada beberapa skripsi dan jurnal dengan pembahasan yang berbeda, Seperti penelitian berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh ilham catur utama dengan judul “Tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja (studi kasus PT. Pelindo III Tanjung Emas Semarang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan kerja terdiri atas faktor manusia, faktor mekanik dan lingkungan. Pada studi kasus PT. Pelindo III Tanjung Emas Semarang, penyebab dari tertabraknya salah satu *Container Crane* (CC) oleh Kapal kontainer MV *Soul of Luck* di Dermaga Petikemas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang disebabkan oleh faktor mekanik dan lingkungan. Tanggung jawab PT. Pelindo III terhadap pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja diantaranya yang pertama yaitu adanya poliklinik sebagai sarana pelayanan kesehatan. Poliklinik tersebut berada dalam kawasan PT. Pelindo III dengan tujuan untuk memudahkan apabila ada pekerja yang membutuhkan pertolongan pertama dengan waktu singkat. Fasilitas poliklinik terdiri dari 2 tenaga medis dan peralatan medis yang memadai. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan mengenai tema yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum atas perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Untuk perbedaannya peneliti dahulu membahas mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perspektif maqashid syariah.¹³

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Habib Rianzi dengan judul “Perlindungan hukum kecelakaan kerja terhadap pekerja (di PT. Pembangunan Dumai)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT Pembangunan Dumai, sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pekerja saat melakukan pekerjaannya (*human error*) sisanya disebabkan oleh faktor lingkungan dan kondisi alam lainnya. Pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di PT. Pembangunan Dumai sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa karyawan yang mengalami kecelakaan kerja di saat melakukan pekerjaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang paling

¹³ Ilham Catur Utama, *Tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja studi kasus di PT. PELINDO III Tanjung Emas Semarang*, (Skripsi Sarjana, Ilmu Hukum Semarang: 2022)

utama ialah adanya unsur kelalaian dari pekerja itu sendiri karena tidak mengindahkan instruksi dari pengusaha ditempat ia bekerja tersebut. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum kecelakaan kerja terhadap pekerja yang pada dasarnya kecelakaan kerja sering terjadi disebabkan dari faktor kelalaian pekerja. Perbedaannya peneliti yang sekarang membahas dibidang kontrukasi dalam perspektif maqasyid syariah.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Fauzan Ahmad Hidayat dengan judul “Pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Primakarya Manunggal Kabupaten Pangkep”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh signifikan antara K3 terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Prima Karya Manunggal. Yang dimana salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga mengurangi dari kecelakaan kerja sehingga kinerja dan produktivitas kerja bagus. Ini dibuktikan dengan pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana dan uji korelasi. Adapun persamaannya dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas mengenai pengaruhnya terhadap produktivitas pada kerja karyawan, sedangkan peneliti yang sekarang membahas mengenai sistem

¹⁴ Muhammad Habib Rianzi, *Perlindungan hukum kecelakaan kerja terhadap pekerja di PT. Pembangunan Dumai*, (Skripsi Sarjana Hukum, Pekanbaru: 2022)

manajemen dan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja K3 dengan perspektif maqashid syariah.¹⁵

4. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum yang ditulis oleh Adam Ilham Fabian, dengan judul “Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Kurir Ekspedisi Ditinjau Dari Asas Keadilan Pancasila”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan kurir merupakan kategori pekerjaan yang relatif baru, muncul karena pertumbuhan layanan jual beli secara online. Kurir berfungsi sebagai penghubung penting antara penjual dan pembeli. Namun, masih banyak hak kurir yang belum terpenuhi secara memadai terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Peraturan saat ini belum cukup mengatur K3 bagi kurir sehingga menyebabkan tingginya kejadian kecelakaan kerja di sektor ini. Hal ini menggaris bawahi perlunya regulasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan pekerja agar sejalan dengan prinsip keadilan dalam Pancasila. Pemerintah harus mengevaluasi kembali undang-undang keselamatan kerja untuk memastikan perlindungan terhadap jenis pekerjaan baru seperti jasa angkutan dan kurir. Selain itu pengembangan regulasi hendaknya senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan ideologi nasional. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja. Perbedaannya adalah

¹⁵ Fauzan Ahmad Hidayat, *Pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Primakarya Manunggal Kabupaten Pangkep*, (Skripsi Diploma Tiga, Teknik Industri Agro, Makasar: 2020)

penelitian terdahulu berfokus pada pekerja kurir ekspedisi ditinjau dari asas keadilan pancasila sedangkan penelitian yang sekarang membahas mengenai keselamatan kerja di bidang kontruksi baja perspektif maqasid syariah.¹⁶

5. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) yang ditulis oleh Armiwal, Suhaibah, dengan judul “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Sigli”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pemsarakatan Lapas Kelas II B Sigli meliputi perlindungan teknis, yakni berkaitan dengan upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pemsarakatan di Lapas Kelas II B Sigli meliputi unsur internal yaitu kekuatan atau kemampuan petugas pemsarakatan dan kondisi psikologis petugas pemsarakatan. Akan tetapi faktor eksternal yaitu unsur-unsur yang berada di luar diri petugas pemsarakatan itu sendiri, diantaranya adanya Undang-undang Keselamatan Kerja. Landasan hukum perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) petugas pemsarakatan di Lapas Kelas II B Sigli didasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

¹⁶ Adam Ilham Fabian, *Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Kurir Ekspedisi Ditinjau Dari Asas Keadilan Pancasila*, (Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No, Surakarta: 2024)

Ketenagakerjaan. Adapun persamaan peneliti dahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu membahas mengenai perlindungan hukum atas keselamatan kerja. Sedangkan perbedaannya untuk peneliti dahulu mengenai aspek Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Sigli. Untuk peneliti ini membahas mengenai sistem manajemen dan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perspektif maqashid syariah.¹⁷

¹⁷ Armiwal, Suhaibah, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Sigli*, (Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) Volume 6, Nomor 1 2023) h 82